



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN



2024

📍 Jl. Lamongrejo 92 Lamongan

☎ (0322) 321706

📧 bakesbangpol@lamongankab.go.id

🌐 www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah, Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX.6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SE Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih kurang sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini dengan memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT semoga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Organisasi	6
1. Personil	6
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Pembiayaan	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP	12
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
1. Tujuan.....	15
2. Sasaran dan Indikator Kinerja	16
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
BAB III	37
AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
A.1 Pencapaian Kinerja	38
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	40
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA	43
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan.....	44
A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
A.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	47
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV	59
PENUTUP	59
PENGHARGAAN	xvi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan

strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan laporan kedua dari 6 (enam) tahun perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bakesbangpol Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan.

1. Tugas

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Fungsi

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Strategis, program Kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi Forum koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. Pembinaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. **Kepala Badan;**
- b. **Sekretaris**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

d. **Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
- 2) Sub Bidang Penanganan Konflik

e. **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, yang membawahi:

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 2) Sub Bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama

f. **Unit Pelaksana Teknis Badan**

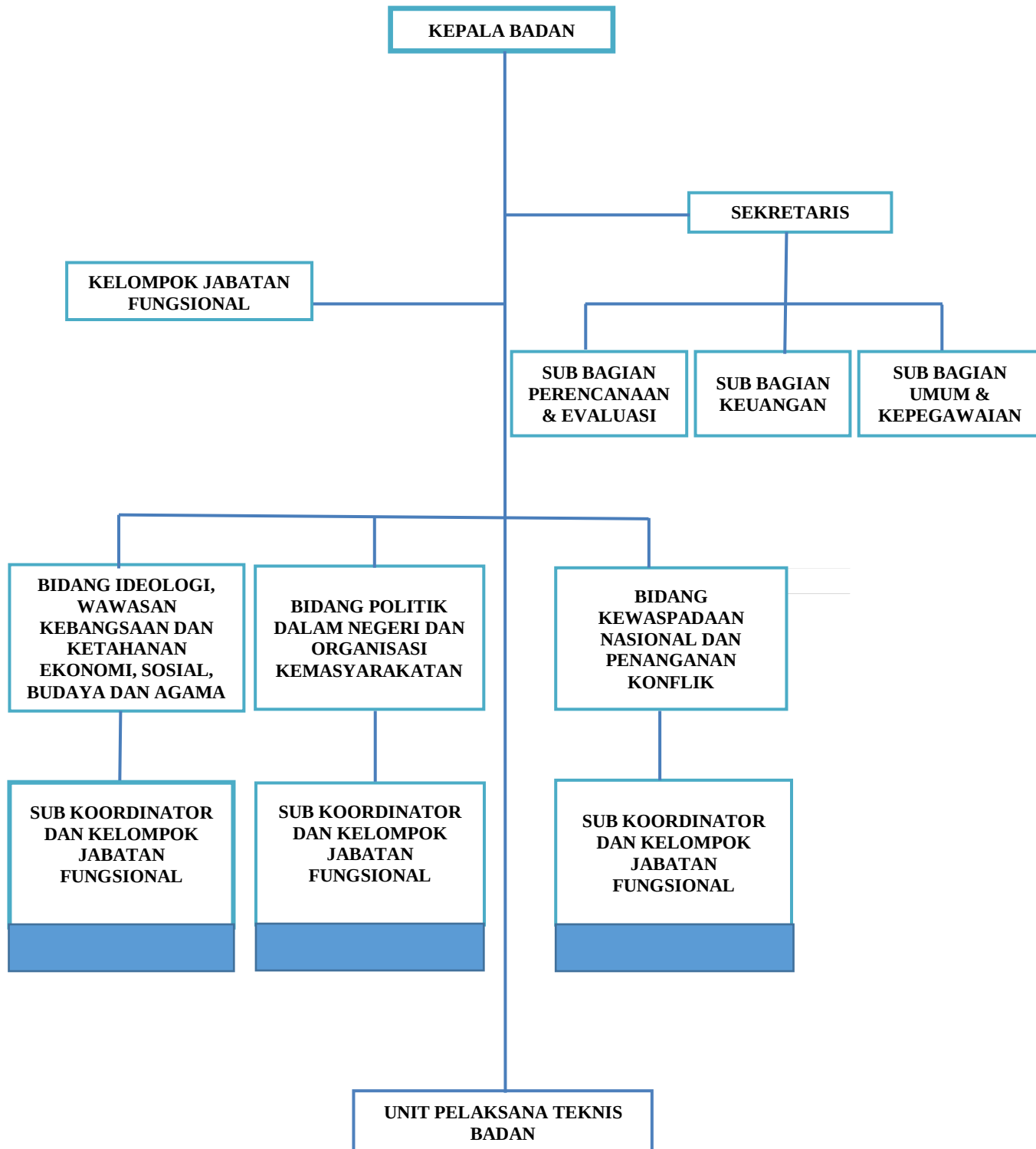
g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun susunan organisasi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan

A. Struktur Organisasi



C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan didukung 32 (tiga puluh dua) pegawai, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Klasifikasi ASN Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	12
3	II	-
4	I	-
	Total	17

Berdasarkan tabel diatas, ASN bakesbangpol tidak ada yang bergolongan I dan mayoritas bergolongan III dengan jumlah 12 pegawai ASN.

Tabel 1.2

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	18 Orang
2.	Perempuan	14 Orang
	JUMLAH	32 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas pegawai di Bakesbangpol adalah laki-laki dengan jumlah 18 orang dan perempuan sejumlah 14 orang.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	17 Orang
2.	Tenaga kontrak	15 Orang
	JUMLAH	32 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas status kepegawaian di Bakesbangpol adalah PNS dengan selisih satu orang dengan pegawai kontrak. Hal ini menunjukan bahwa pegawai bersetatus ASN perlu ditambah.

Tabel 2.4

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	5	0	0	5
2	S1/D4	10	0	12	22
3	D3	0	0	0	0
4	SMA/Sederajat	2	0	3	5
5	SMP/Sederajat	0	0	0	0
	Total	17	0	15	32

Berdasarkan tabel 2.4, mayoritas pegawai Bakesbangpol memiliki pendidikan terakhir S1/D4. Sedangkan kualifikasi pendidikan terakhir D3 dan SMP/Sederajat tidak ada. Dapat disimpulkan untuk kualifikasi pendidikan terakhir S2 dirasa masih kurang sehingga kompetensi pegawai masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2.5

Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kab. Lamongan Berdasarkan Jabatan

No	Posisi	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2.	Sekretaris	Sekretaris	-
		Kasubbag	3 orang
		Staf	11 orang
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	2 orang
		Staf	5 orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
5.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kepala Bidang	1 orang
		Pejabatn Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang	1 orang
		Staf	3 orang

Berdasarkan tabel diatas, Bakesbangpol terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana setiap bidang terdiri dari satu Kepala Bidang, dua Pejabatan Fungsional Sub Koordinator Sub Bidang dan beberapa staf. Sedangkan untuk sekretariat terdiri dari sekretaris, tiga kasubag dan beberapa staf. Dapat disimpulkan bahwa setiap bidang memiliki dua Kasubid namun jumlah staf yang ada masih dirasa kurang untuk membantu pencapaian kinerja disetiap bidang.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana Penunjang Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Data Penunjang Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kab. Lamongan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	5
2	Pick Up	1
3	Sepeda Motor	10
4	Speed Boat	1
5	Motor Boad	2
6	Motor Tempel	1
7	Perahu Karet	3
8	Gergaji	1
9	Sepatu Katak	1
10	Mesin Ketik	7
11	Tas Selam	1
12	Sepatu Selam	2
13	Bouyancy Control Devive	4
14	Kompresor	1
15	Kacamata Selam	2
16	Oct topus	3
17	Presure Gauge	3
18	Regulator selam	2
19	Snorkel Selam	2
20	Tabung	2
21	Kostum Renang	2
22	Tas Selam	1
23	Lemari Besi/Kayu	7
24	Band Kas	1
25	Lemari Kaca	5
26	White Board Electronik	1
27	Bag Scubapro	1
28	Booties Scubapro	1

29	Fin Scubapro	1
30	Mask Scubapro	1
31	Regulator	1
32	Sabuk	1
33	Snorkel	1
34	Tabung Udara	1
35	Timah	1
36	Wetsuit	1
37	Lemari Kayu	7
38	Tempat Tidur Besi	2
39	Meja Rapat	1
40	Meja Tulis	1
41	Kursi Rapat	65
42	Tenda	2
43	Sofa	2
44	Meja Kursi Tamu	1
45	Tampar	3
46	Lampu Hias	6
47	Gorden	1
48	Genset	1
49	Rak Besi	5
50	Lemari es	1
51	AC	13
52	Kipas Angin	6
53	Televisi	3
54	Tip Wireless	1
55	Mega Phone	3
56	Tangga Alumunium	1
57	Tangki Air	1
58	Mainframe	5
59	LCD Proyektor	2
60	PC.Unit	18
61	Laptop	5
62	Note Book	6

63	Tablet	3
64	PC All In One	1
65	Printer	22
66	Meja Kerja	25
67	Kursi Kerja	22
68	Kamera	15
69	Marching Trombone	1
70	Korsik	1
71	Perekam	1
72	Handycame	2
73	Trompet	1
74	Comcoder	1
75	Prosume	1
76	Kamera Drone	1
77	Video Audio Jack Panel	5
78	Telescope	1
79	Kompas	6
80	Amplifier	1
81	Telephone PABX	1
82	Pesawat Telephone	2
83	Han Talky (HT)	2
84	Faximile	1
85	UT SSB Portable	2
86	UT HF Portable	2
87	CCTV	1
88	Senter	3
89	Gas Sylinder	1
90	Teropong	1
91	Kursi Eselon II	2
92	Headphone	4
93	Tripod	2
94	Mixer	1
95	Battery	1
96	Lighting	2
97	Mic	4

98	Orbit	1
99	Stundmic	4
100	Video Swithcer	1

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 100 jenis sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan sasaran indikator dengan didukung 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran **Rp. 111.635.447.933,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 111.333.831.222,00** atau **99,73%** dengan rincian sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 1.3

Rincian Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamongan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pesen (%)
	BELANJA DAERAH	111.635.412.233,00	111.333.831.222,00	99,73
1	BELANJA OPERASI	111.615.728.233,00	111.314.177.222,00	99,73
	Belanja Pegawai	2.851.522.599,00	2.711.734.647,00	95,10
	Belanja Barang dan Jasa	3.366.742.300,00	3.226.219.242,00	95,83
	Belanja Hibah	105.397.463.334,00	105.376.223.333,00	99,98
2	BELANJA MODAL	19.684.000,00	19.654.000,00	99,85
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.684.000,00	19.654.000,00	99,85
	JUMLAH BELANJA DAERAH	111.635.412.233,00	111.333.831.222,00	99,73

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi

perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Bakesbangpol Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok, fungsi, dan gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana serta pembiayaan Perangkat Daerah.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, indikator sasaran, Rencana Kinerja Tahun 2024, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matris Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran lainnya (Penghargaan dsb.)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di dalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai tolak ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan diambil dari perwujudan visi Kabupaten Lamongan **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**. Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh institusi pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kedepan lebih berfokus pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan daerah yang mantap dan dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi secara tepat, terarah, terencana dan terpadu. Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan masuk ke dalam misi ke-4 Kabupaten Lamongan yaitu **“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religious, berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram”**. Uraian misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya harus mampu mengkoordinasikan situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif, aman dan tertib menjaga suatu pemerintahan yang demokratis dengan menumbuhkembangkan kehidupan berpolitik sebagai upaya untuk merekatkan kehidupan berbangsa yang transparan serta aktif dan mandiri.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam merespon perubahan dan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, dalam praktek kehidupan berBangsa dan berNegarapun telah mengalami perubahan-perubahan seperti misalnya dalam bidang politik. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas jelas bahwa peran pemerintah yang pada masa lalu sangat kuat dan kini

harus dibagi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembagian peranan sebagaimana dimaksud dirasakan sangat efektif untuk diterapkan di era otonomi daerah dewasa ini.

Pemikiran tersebut didasarkan pada anggapan bahwa lembaga pemerintah di daerah beserta seluruh warga masyarakatnya adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Disinilah perlunya diadakan suatu perencanaan pembangunan yang terencana, komprehensif namun tetap memperhatikan eksistensi daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyusunan Renstra harus ada keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra tersebut telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah dan akan menetapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan lebih lanjut akan menjadi pedoman dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan di dalam RPJMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Lamongan. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2021-2026 merupakan implementasi dari penjabaran misi ke 4 (empat). Adapun tujuannya adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religious, berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Sasaran

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2021-2026 digambarkan rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dari tujuan tersebut Bakesbangpol mempunyai 3 (tiga) sasaran yang merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram	Meningkatkan Toleransi	Nilai Toleransi	1. Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan 2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Adapun Indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongantahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

No	SASARAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	Jumlah konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani x 100 Jumlah konflik yang ada
2.	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	Akumulasi jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik x 100 Jumlah kelompok masyarakat sasaran pendidikan politik (Jumlah sasaran = 800)
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi Formula $\frac{\text{Jumlah masyarakat pemilih}}{\text{Jumlah hak pilih}} \times 100$
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi Formula $\frac{\text{Jumlah masyarakat pemilih}}{\text{Jumlah hak pilih}} \times 100$
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi Formula $\frac{\text{Jumlah masyarakat pemilih}}{\text{Jumlah hak pilih}} \times 100$
3.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat

B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kabupaten Lamongan untuk tahun 2024 diturunkan dari Renstra Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target- target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol untuk tahun 2024, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator *output* dan *outcome* yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2024. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/kegiatan, *output* dan indikator *output*, serta *outcome* dan indikator *outcome*.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2024, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator *output* dan *outcome* dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator *outcome* yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat *immediate outcome* yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator *output* ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2024 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target t Akhir Perio de Renstr ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							97.811.438.20,00	111.363.039.000,00	111.475.447.933,00						6.685.221.495,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							97.811.438.20,00	111.363.039.000,00	111.475.447.933,00						6.685.221.495,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							97.811.438.20,00	111.363.039.000,00	111.475.447.933,00						6.685.221.495,00		
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.706.780.140,00	3.825.414.000,00	3.515.984.599,00							4.122.346.495,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	37.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00			-	-	-		65.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lamongan, Lamongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas				
																			Nasio nal		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			20.300.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			25.375.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	2.900.373.000,00	3.094.952.000,00	3.094.952.000,00			-	-	-		2.964.178.595,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bu lan	21 Orang/bu lan	2.880.373.000,00	3.074.952.000,00	2.761.522.599,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			2.923.578.595,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			20.300.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.000.000,0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			20.300.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%Aparatur yang disiplin	-			100 %	100 %	41.530.000,0 0	0,00	0,00			-	-	-		126.875.000, 00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	44 Paket	13.650.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			15.225.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target t Akhir Perio de Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				44 Orang	44 Orang	27.880.000,00	0,00	0,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			111.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	-			100 %	100 %	99.287.140,00	85.440.000,00	85.440.000,00			-	-	-		190.242.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.105.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.105.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.847.140,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																Kel/Des a	si Umu m								
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-		18.200.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK			
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokume n	9 Dokume n	15.440.000,0 0	15.440.000,00	15.440.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-		15.732.500,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK			
	8	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	35.000.000,0 0	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-		101.500.000, 00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK			
	8	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-			-	-	35.000.000,0 0	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-	66.990.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasio nal		Daerah	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Daerah																			
	8	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			16.240.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK		
	8	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			50.750.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK		
	8	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	-			100 %	100 %	484.460.000, 00	462.892.000,0 0	462.892.000,0 0			-	-	-		492.905.400, 00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK		
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.100.000,0 0	49.100.000,00	49.100.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			50.000.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
																		Nasio nal					Daerah
											1	2					3	4		5	6		7
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			5.075.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	431.360.000,00	409.792.000,00	409.792.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			437.830.400,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	-			100 %	100 %	109.130.000,00	123.130.000,00	123.130.000,00			-	-	-		215.180.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	76.690.000,00	95.690.000,00	95.690.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			101.500.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
																			Nasional		Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.180.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			101.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi Pemuda				60 %	60 %	700.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00							0,00				
	8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			7 Dokumen	7 Dokumen	700.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00			-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasio nal		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				730 Orang	730 Orang	300.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				300 Keluarga	300 Keluarga	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				76 Orang	76 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		ketahanan bencana					
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase cakupan pendidikan politik masyarakat				60 %	60 %	81.994.658.080,00	103.669.625.000,00	98.721.463.334,00							406.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			3 Dokumen	3 Dokumen	81.994.658.080,00	103.669.625.000,00	103.669.625.000,00			-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana	-		406.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasio nal				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400 Orang	400 Orang	81.944.658.080,00	103.519.625.000,00	98.631.463.334,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				149 Laporan	149 Laporan	50.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			406.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang bertentangan dengan asas pancasila				0 %	0 %	625.000.000,00	980.000.000,00	785.000.000,00							705.425.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			7 Dokume n	7 Dokume n	625.000.000,00	980.000.000,0	980.000.000,0			-	-	-		705.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					3 Dokume n	3 Dokume n	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					1 Dokume n	1 Dokume n	130.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			253.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas					
																		Nasio nal		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Orang	20 Orang	465.000.000,00	915.000.000,00	720.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Aloka si Umum	-	-			406.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				60 %	60 %	130.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00							436.450.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			6 Dokumen	6 Dokumen	130.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00			-	-	-		436.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				650 Orang	650 Orang	100.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Aloka si Umum	-	-			355.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lamong an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			81.200.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK		
6	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	10.655.000,0 00,00	2.399.000.000, 00	7.964.000.000, 00							1.015.000,00 0,00		
	8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	-	10.655.000,0 00,00	2.399.000.000, 00	2.399.000.000, 00			-	-	-		1.015.000,00 0,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	2.0	000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Perio de Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			101.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3790 Orang	3790 Orang	10.080.000,00,00	1.900.000.000,00	7.465.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			406.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasio nal		Daerah	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				654 Laporan	654 Laporan	65.000.000,0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			50.750.000,0 0	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 6	2.0 1	000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokume n	12 Dokume n	450.000.000, 00	450.000.000,0 0	450.000.000,0 0	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	-			456.750.000, 00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H										97.811.438.2 20,00	111.363.039.0 00,00	111.475.447.9 33,00							6.685.221.49 5,00			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah; untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Bakesbangpol Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja. Adapun perjanjian kinerja Bakesbangpol tahun 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024

Eselon II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	81,3%
	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD	78,53%
	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur	62,00%
	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati	77,24%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35

Eselon III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,10
Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	81,3%
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, Orpem Dan LSM Yang bertentangan dengan asas pancasila	0%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat	92%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	78,00%
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

Perencanaan dan penentuan perjanjian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah diikuti dengan perencanaan dan penetapan kinerja pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan secara berjenjang, sebagaimana terlampir.

Dalam rangka terlaksananya perencanaan dan perjanjian kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024, telah didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan piranti perencanaan yang telah dibuat. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan didasarkan pada target dan Realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik. Penghitungan

prosentase pencapaian rencana (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memerhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Visi Kabupaten Lamongan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan skala pengukuran dan predikat kinerja yaitu :

Tabel 3
Skala Pengukuran Keberhasilan

Skala Pengukuran	Penilaian
85 – 100	Sangat baik/sangat berhasil
70 < 85	Baik sekali
55 < 70	Kurang baik/kurang berhasil
< 55	Sangat kurang baik/tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1 Pencapaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Indikator keberhasilan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam menjaga tetap terjaminnya kondisi sosial politik di daerah cukup mantap, aman, tertib dan terkendali. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100% $\frac{10}{10} \times 100$	100%	sangat baik/ sangat berhasil
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	81,30%	172,5% $\frac{1380}{800} \times 100$	212,18%	sangat baik/ sangat berhasil
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD	78,53%	82,068% $\frac{857.431}{1.044.776} \times 100$	104,50%	sangat baik/ sangat berhasil
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur	62,00%	73,58% $\frac{761.908}{1.035.507} \times 100$	118,68%	sangat baik/ sangat berhasil
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati	77,24%	73,58% $\frac{761.908}{1.035.507} \times 100$	95,26%	Menurun tapi masih tinggi
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35			Masih proses penilaian inspektorat

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas secara umum indikator sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh beberapa program, yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program

Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	50%	81,25%	172,5%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD			82,068%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur			73,58%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati			73,58%
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,07	89,33	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dari tahun 2022 ke tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran yang ditetapkan secara umum capaian tiga sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dan capaian tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, yaitu indikator prosentase konflik sosial yang ditangani dengan target 100% terpenuhi dengan capaian 100% dari 10 konflik yang ada semuanya tertangani dalam kewenangan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan. Tercapainya indikator tersebut didukung dari kegiatan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, yaitu:
 - a. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik terealisasi sebesar 172,5% ;
 - b. Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD terealisasi sebesar 82,068%;
 - c. Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur terealisasi sebesar 73,58%;
 - d. Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati terealisasi sebesar 73,58%.Tercapainya indikator tersebut didukung dari kegiatan dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, yaitu Indikator Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target nilai sebesar 89,35 pada tahun 2024 masih dalam proses penilaian dari Inspektorat

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sudah terealisasi dengan baik bahkan diatas target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan capaian kinerja pendukung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pendukung Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83,90	84,03	84,10
2	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	50%	81,25%	172,5%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, Orpem Dan LSM Yang bertentangan dengan asas Pancasila	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat	60,83%	91%	121,2%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	35%	76%	120%
6	Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan antara 2024 dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Akhir Periode RENSTRA 2026
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	50%	81,25%	172,5%	100%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD			82,068%	78,53%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur			73,58%	62,00%
		Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati			73,58%	77,24%
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,07	89,33		87,17

Hasil kinerja dari tahun 2022-2024 telah mengalami peningkatan dan sudah diatas target akhir periode RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, sehingga untuk penetapan target tahun yang akan datang akan ditetapkan diatas realisasi Tahun 2024.

A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari pencapaian target kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Badan dengan Bupati Lamongan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

1. Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) Program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran aktif Tim Monitoring, Tim PKS, Tim Kewaspadaan Daerah dan FKUB dalam melakukan kegiatan pencegahan konflik melalui kegiatan di Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, serta dukungan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melalui kegiatan deteksi dini terhadap ATHG oleh Tim Monitoring, pengamanan wilayah oleh Jajaran samping seperti Polres dan Kodim dan Penanganan Konflik sosial yang timbul di masyarakat oleh Bakesbangpol bersama FORKOPIMDA, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat agar tidak menyimpang dari asas Pancasila dan dapat mendukung kondusifitas wilayah Kabupaten Lamongan.
2. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dilaksanakan melalui program Pendidikan Politik Masyarakat, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh satu program, satu kegiatan dan dua sub kegiatan. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Meningkatnya pelayanan OPD melalui layanan pengaduan masyarakat dan kesadaran terkait SAKIP di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Efisiensi mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Faktor penentu efisiensi adalah:
 - 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
 - 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
 - 4) Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
 - 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Salah satu cara sederhana untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, dana/anggaran dan sarana prasarana) dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	9.308.000.000,00	8.770.344.090,00	94,22

Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	98.721.463.334,0 0	98.714.276.974,0 0	99,99
	Presentase Partisipasi Masysrakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden, DPD/DPR/DPRD			
	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Gubernur			
	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Bupati			
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.605.984.599,00	3.403.477.458,00	94,38

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan per sasaran kinerja telah terealisasi sesuai dengan perencanaan anggaran.

Tabel 3.6

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	%Tingkat Efesiensi
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	100%	94,22%	5,78%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik	73,58%	99,99%	0,01%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD	82,068%		
	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur	73,58%		

	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	73,58%		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		94,38%	5,62%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan per sasaran kinerja telah menunjukkan nilai yang baik, dimana semakin kecil efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin baik.

A.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang ditetapkan di tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya semua program dan kegiatan, adapun program dan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan target di tahun 2024 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, terdiri dari

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.000.000 yang dipergunakan untuk menyusun laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 43.000.000 atau sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.760.492.000,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.851.522.599,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 2.731.673.307,00 atau 95,13, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.999.860,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.

10.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan bulanan/ semesteran dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.938.800,00 atau 99,39% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.440.000,00 dipergunakan untuk:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pembelian komponen instalasi listrik dan bangunan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 4.979.100,00 atau 99,58% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 5.000.000 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pembelian ATK, makanan dan minuman rapat dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.998.800,00 atau 99,99% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.516.000,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.440.000 dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (majalah & surat kabar) dan perundang-undangan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.702.000,00 atau 95,22% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk perjalanan dinas rapat koordinasi luar daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 29.707.053,00 atau 99,02% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 yang digunakan untuk:

- 1) Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian peralatan lemari arsip besi dan meja resepsionis kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.970.000,00 atau 99,70% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian peralatan Komputer Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 462.892.000,00 yang digunakan untuk:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.100.000,00 dipergunakan untuk pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 36.127.484,00 atau 73,58% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.000.000 dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 409.792.000,00 dipergunakan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan pengamanan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 365.007.664,00 atau 89,07% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 123.130.000,00 yang digunakan untuk:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.690.000,00 dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil jabatan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 92.650.050,00 atau 96,82% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.440.000,00 dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 2.440.000,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dipergunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 24.706.000,00 atau 98,82% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, terdiri dari:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 430.000.000,00 yang digunakan untuk:

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 dipergunakan untuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 60.000.000 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 2) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan bersama Ibu PKK berupa lomba Tiktok peringatan hari anti Narkoba Internasional sebagai upaya pencegahan terhadap budaya anti narkoba di masyarakat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000,00 atau 99,23% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 3) Pembentukan Pkibraka dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan seleksi Paskibraka berupa seleksi administrasi, Pancasila, TIU, Kesehatan, PBB dan Wawancara pada bulan Februari 2024 sejumlah 300 peserta dan terpilih sejumlah 76 anggota Paskibraka dan dilanjutkan dengan latihan Paskibraka dalam rangka persiapan kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 344.732.700,00 atau 98,50% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK terdiri dari:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.721.463.334,00 yang digunakan untuk:
- 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.631.463.334,00 dipergunakan untuk pemberian dana hibah parpol, hibah bawaslu dan hibah KPU dan sosialisasi pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.624.329.494,00 atau 99,99% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000 digunakan untuk dan monitoring situasi politik di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 89.947.480,00 atau 99,94% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, yang terdiri dari:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 855.000.000,00 yang digunakan untuk:
- 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.000.000 melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas dokumen, melaksanakan verifikasi lapangan terhadap keberadaan Ormas, menerbitkan surat keterangan keberadaan ormas di Kabupaten Lamongan dan pendataan ulang organisasi se Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.324.600,00 atau 89,61% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,00 yang dipergunakan untuk rapat koordinasi, serta melakukan pembinaan terhadap Ormas, Orpem dan LSM. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 89.139.600,00 atau 99,04% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 720.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemberian bantuan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 22 Ormas/LSM yang aktif dan terdaftar Kemenkumham yang lolos verifikasi penerimaan dana hibah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 720.000.000,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**, yang terdiri dari:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.000.000,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.000.000,00 yang dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 48.170.000,00 atau 98,31% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 yang dipergunakan untuk pemantauan penghayat kepercayaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.980.000,00 atau 99,80% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, yang terdiri dari:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.964.000.000,00 yang digunakan untuk:
- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 102.000.000,00 yang dipergunakan untuk peningkatan kinerja Tim Kewaspadaan Dini Daerah ataupun tim PKS dalam memfasilitasi informasi terkait Ipoleksosbud yang berpotensi konflik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 101.373.060,00 atau 99,39% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.481.400.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lamongan yang bekerjasama dengan jajaran samping yaitu Polres dan Kodim 0812 Lamongan dan pemberian hibah instansi vertikal kepada Polres dan Kejaksaan Negeri. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.401.845.000,00 atau 98,94% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk Monitoring dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial, serta pengawasan orang Asing di 27 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.912.530,00 atau 92,57% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,42%.

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 365.600.000,00 yang dipergunakan untuk rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan dalam menangani isu-isu atau persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 365.599.300,00 atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan harmoni sosial dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi, sedangkan jumlah personil tim monitoring Bakesbangpol masih kurang;
- b. Belum adanya pendidikan wawasan kebangsaan yang berbasis pembelajaran;
- c. Belum optimalnya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan pengawasan Ormas dan LSM;
- d. Sasaran sosialisasi UU Pemilu yang masih kurang luas.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi *output dan outcome*.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan sasaran indikator dengan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 111.635.447.933,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 111.333.831.222,00** atau **99,73%**. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.605.984.599,00	3.403.477.458,00	94,38
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.871.522.599,00	2.731.673.307,00	95,13
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.851.522.599,00	2.711.734.647,00	95,10
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.999.860,00	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.938.800,00	99,39
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.440.000,00	83.902.953,00	98,20
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.979.100,00	99,58
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.998.800,00	99,99
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.516.000,00	96,77
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.440.000,00	14.702.000,00	95,22
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.707.053,00	99,02
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.970.000,00	99,85
1)	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.892.000,00	405.135.148,00	87,52
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.100.000,00	36.127.484,00	73,58
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.792.000,00	365.007.664,00	89,07
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.130.000,00	119.796.050,00	97,29
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.690.000,00	92.650.050,00	96,82

2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.706.000,00	98,82
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	430.000.000,00	424.732.700,00	98,78
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	430.000.000,00	424.732.700,00	98,78
1)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
2)	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
3)	Pembentukan Pkibraka	350.000.000,00	344.732.700,00	98,50
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	98.721.463.334,00	98.714.276.974,00	99,99
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	98.721.463.334,00	98.714.276.974,00	99,99
1)	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	98.631.463.334,00	98.624.329.494,00	99,99
2)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	90.000.000,00	89.947.480,00	99,94
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	855.000.000,00	849.464.200,00	99,35
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	855.000.000,00	849.464.200,00	99,35

	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
1)	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	45.000.000,00	40.324.600,00	89,61
2)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90.000.000,00	89.139.600,00	99,04
3)	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	59.000.000,00	58.150.000,00	98,56
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	59.000.000,00	58.150.000,00	98,56
1)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.000.000,00	48.170.000,00	98,31
2)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.964.000.000,00	7.883.729.890,00	98,99
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.964.000.000,00	7.883.729.890,00	98,99
1)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	102.000.000,00	101.373.060,00	99,39
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	7.481.400.000,00	7.401.845.000,00	98,94

	Konflik di Daerah			
3)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.000.000,00	14.912.530,00	99,42
4)	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	365.600.000,00	365.599.300,00	100,00
JUMLAH BELANJA		111.635.447.933,00	111.333.831.222,00	99,73

Jika dilihat realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyerap anggaran untuk mendukung Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sehingga tercapai Sasaran Strategis sesuai dengan rencana awal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik.

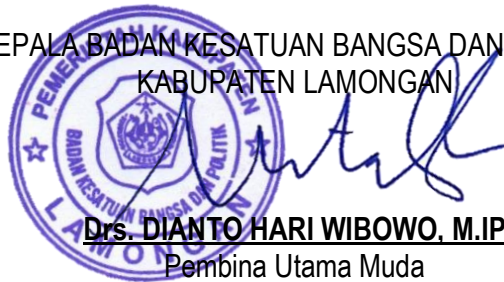
Namun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Namun seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terus berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Lamongan, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760410 199412 1 002

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		Baseline 2020	Target Kinerja					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KONDISI AKHIR
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2022	2024	2024	2025	2026	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik	Nilai Toleransi	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan	Prosentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan (Jml masalah yg selesai x 100 Jml masalah yg masuk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penanganan konflik serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	•100% (12 konflik yang ada terselesaikan semua selama satu tahun pada tahun 2024) •Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi pendidikan politik sebanyak 650 peserta •Tahun 2018 jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur sebesar 62% •Tahun 2019 jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	PersentasePeningkatan Pendidikan Politik	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesatuan dan persatuan bangsa melalui sosialisasi wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur (Jml masyarakat pemilih x 100 Jml hak pilih)	62,00%	-	-	62,00%	-	-	Meningkatkan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu	Program Pembinaan Dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan	78,53%	-	-	78,53%	-	-	Penyaluran dana bantuan pada partai politik untuk mengembangkan peran dan kapasitas partai politik dalam pengembangan demokratisasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

TUJUAN		SASARAN		Baseline 2020	Target Kinerja					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KONDISI AKHIR
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2022	2024	2024	2025	2026	Kebijakan	Program	
					1	2	3	4	5			
			Presiden dan Pemilihan DPD/DPR/DPRD (Jml masyarakat pemilih x 100 Jml hak pilih)							Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	presiden dan legislatif sebesar 78,53%
			Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati (Jml masyarakat pemilih x 100 Jml hak pilih)	77,24%	-	-	77,24%	-	-			
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,11	87,14	87,15	87,16	87,17	87,13	Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala		Nilai SAKIP pada tahun 2024 adalah
										Peningkatan kuantitas dan kompetensi Pegawai		
										Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran		

**DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	1. Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik	81,30%	172,5%
	2. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD	78,53%	82,068%
	3. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur	62,00%	73,58%
	4. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	77,24%	73,58%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan koordinasi anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
2. Membuat Posko Penanganan konflik sosial;
3. Membuat Prosedur yang lebih baik lagi terkait penerimaan bantuan LSM maupun parpol;
4. Melaksanakan koordinasi rutin dengan anggota parpol sehingga tindak lanjut temuan BPK dapat diselesaikan dengan cepat sehingga untuk proses pencairan bantuan tahun selanjutnya lebih tepat waktu;
5. Memaksimalkan pembinaan yang dilaksanakan dengan lebih memperluas sasaran yang dibina;
6. Memaksimalkan kinerja anggota sehingga indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Pejabat maupun Staf pada Bakesbangpol Kabupaten Lamongan di dorong terus agar lebih maksimal kinerjanya dengan cara mengadakan koordinasi rutin dan mewadahi segala bentuk konsep baru yang dapat meningkatkan kinerja.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain
	
	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, pencapaian dari target telah tercapai sesuai dengan yang diperjanjikan bahkan melebihi dari apa yang direncanakan.

Lamongan, 30 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Jabatan : Bupati Lamongan

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	1. Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur 4. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	81,30% 78,53% 62,00% 77,24%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.825.414.000,-	APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 430.000.000,-	APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 103.669.625.000,-	APBD
4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 980.000.000,-	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 59.000.000,-	APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.399.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 111.363.039.000,-	APBD

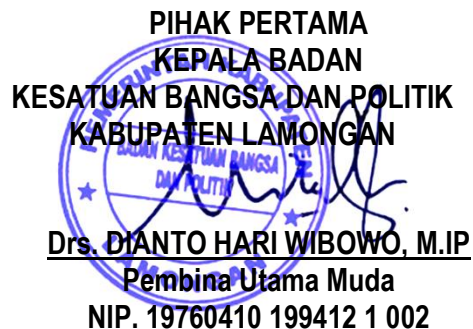
Lamongan, 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



DR. H. HONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : Drs. K.H. ABDUL ROUF, M.Ag.
Jabatan : Plt. Bupati Lamongan
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, 07 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI LAMONGAN

Drs. K.H. ABDUL ROUF, M.Ag.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	1. Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	100%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur 4. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	81,30% 78,53% 62,00% 77,24%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.605.984.599,-	APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 430.000.000,-	APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 98.721.463.334,-	APBD
4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 855.000.000,-	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 59.000.000,-	APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 7.964.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 111.635.447.933,-	APBD

Lamongan, 07 Oktober 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Drs. K.H. ABDUL ROUF, M.Ag.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**


Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

PENGHARGAAN

1. Pada tanggal 22 Maret 2024 : Menerima Penghargaan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 dengan Predikat Memuaskan.



Gambar 1. Penerimaan Penghargaan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023

2. Pada tanggal 1 Juni 2024 : Menerima Penghargaan Peringkat III Lomba WEBSITE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.



Gambar 2. Penghargaan Peringkat III Lomba WEBSITE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

3. Pada tanggal 30 Agustus 2024 : Menerima Penghargaan Harapan 1 lomba estafet air dalam peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.



Gambar 3. Penghargaan Harapan 1 Lomba Estafet Air Dalam Peringatan HUT RI 17 Agustus 2024